

Mendorong transparansi desa: Kiprah PSM dalam penyusunan laporan keuangan BUMDesa yang andal

Siswanto

Politeknik Keuangan Negara STAN

AKURASI

313

Abstract

This study examines the role of Community Self-Help Facilitators (Penggerak Swadaya Masyarakat/PSM) in improving the quality of financial reporting in Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Sleman Regency, Indonesia. The research adopts a qualitative case study approach, involving observation and in-depth interviews with 34 active PSMs. Findings reveal that PSMs play a strategic role in assisting BUMDes in complying with financial reporting standards mandated by the Ministry of Villages Regulation No. 136/2022. Their support includes providing technical guidance, enhancing accountability, and promoting transparency in financial management. However, several challenges were identified, including limited accounting competence among PSMs, insufficient and irregular training, weak internal governance within BUMDes, and inadequate local government support. The study concludes that a holistic approach is needed to improve financial reporting quality, including continuous training programs for PSMs and BUMDes managers, formal integration of PSM roles into village governance systems, the use of digital tools for financial recording, and stronger multi-stakeholder support.

Public interest statements

BUMDes often struggle to prepare standardized financial reports due to limited accounting skills. This study highlights the vital role of Community Self-Help Facilitators (PSM) in providing guidance and capacity building to improve financial transparency, accountability, and sustainability in rural governance and economic development.

Keywords: Community Self-Help Facilitator, Village-Owned Enterprise, financial reporting, accountability, community empowerment

Paper type: Research paper

✉ Corresponding: Siswanto.
Email: siswanto@pknstan.ac.id



© The Author(s) 2025
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ARTICLE INFO:

Received 7/25/2025
Revised 9/13/2025
Accepted 10/17/2025
Online First 12/6/2025



AKURASI: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 7, No. 3, 2025, 313-326
eISSN 2685-2888

Abstrak

Studi ini mengkaji peran Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sleman, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, yang melibatkan observasi dan wawancara mendalam dengan 34 PSM aktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PSM memainkan peran strategis dalam membantu BUMDes mematuhi standar pelaporan keuangan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Desa No. 136/2022. Dukungan mereka meliputi pemberian bimbingan teknis, peningkatan akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun, beberapa tantangan teridentifikasi, termasuk kompetensi akuntansi yang terbatas di antara PSM, pelatihan yang tidak memadai dan tidak teratur, tata kelola internal yang lemah di dalam BUMDes, dan dukungan pemerintah daerah yang tidak memadai. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan holistik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, termasuk program pelatihan berkelanjutan bagi PSM dan pengelola BUMDes, integrasi formal peran PSM ke dalam sistem tata kelola desa, penggunaan perangkat digital untuk pencatatan keuangan, dan dukungan multi-pemangku kepentingan yang lebih kuat.

Pernyataan kepentingan publik

BUMDes seringkali kesulitan menyusun laporan keuangan standar karena keterbatasan keterampilan akuntansi. Studi ini menyoroti peran penting Fasilitator Swadaya Masyarakat (FSM) dalam memberikan arahan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan dalam tata kelola dan pembangunan ekonomi pedesaan.

Kata Kunci: Penggerak Swadaya Masyarakat, BUMDes, laporan keuangan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan kapasitas, tata kelola desa

PENDAHULUAN

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dibentuk sebagai bagian krusial dari upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan partisipatif, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas lokal, khususnya di tingkat desa, di mana pembangunan ini sering efektif melalui pemanfaatan modal sosial yang melibatkan ikatan antarwarga dan koneksi dengan institusi formal serta kerja sama multipihak (Nalikan et al., 2025). Pendekatan pembangunan lokal yang berorientasi pada partisipasi masyarakat ini memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan solidaritas kolektif untuk menjamin kelangsungan program (Ahmad & Abu Talib, 2013, 2016). PSM hadir untuk mendorong pendekatan *bottom-up* melalui keterlibatan masyarakat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa, di mana partisipasi ini, seperti yang terjadi dalam Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), menghasilkan peningkatan kesadaran dan komitmen (Sutadi, 2024). Sebagai relawan sosial yang bekerja secara sukarela untuk mendampingi dan menggerakkan potensi masyarakat agar lebih mandiri, PSM dan relawan sosial lainnya (seperti yang diorganisir dalam kelompok masyarakat untuk pemberdayaan pemuda) memegang peran kunci dalam pengembangan masyarakat, meskipun PSM, sebagai posisi fungsional, menghadapi tantangan dalam pengoptimalan tugas akibat isu penempatan, kurangnya kompetensi, dan dukungan kepemimpinan yang tidak memadai (Hanafie, 2020; Salim, 2024).

Kementerian Sosial RI telah mengembangkan peran PSM sebagai strategi pemberdayaan sosial masyarakat, dimana PSM berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup

masyarakat desa melalui penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja (Kurniasih, 2025), serta mendukung sistem perlindungan anak di Indonesia melalui pencegahan primer dan intervensi berbasis komunitas (O'Leary et al., 2019). Lebih lanjut, PSM memiliki potensi strategis untuk mendukung tata kelola keuangan desa, khususnya bagi BUMDes, melalui pelatihan dalam aspek pelaporan keuangan, manajemen, penggunaan teknologi, dan penguatan modal sosial (Aji et al., 2025; Rahayu et al., 2024), mengingat fungsi akuntabilitas BUMDes sangat dipengaruhi oleh kapasitas teknis yang belum merata. Meskipun mandatnya besar sebagai agen pemberdayaan, banyak PSM dan pengelola BUMDes menghadapi tantangan signifikan berupa keterbatasan kompetensi dalam bidang akuntansi, manajemen keuangan, penyusunan laporan, dan pemenuhan regulasi, yang berdampak pada inefektivitas operasional BUMDes (Aji et al., 2025; Fitriani et al., 2024; Kania et al., 2021). Kondisi ini menciptakan celah penelitian yang penting, yaitu bagaimana kontribusi PSM sebagai agen pemberdayaan dapat dimaksimalkan untuk mendukung akuntabilitas laporan keuangan BUMDes di tengah keterbatasan pengetahuan teknis mereka.

Penelitian ini menawarkan solusi berupa perlunya pelatihan rutin dan terstruktur bagi PSM untuk menjaga kompetensi. Pelatihan berkelanjutan sangat krusial; misalnya, pendekatan pembelajaran campuran terbukti efektif meningkatkan kapasitas fasilitator pemberdayaan di desa wisata karena mengatasi kendala waktu (Sutisna et al., 2024). Program terencana secara sistematis juga memperkuat kapasitas dan reputasi PSM sebagai agen perubahan (Kaysin et al., 2024). Lebih lanjut, pelatihan rutin menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh pelatihan pemimpin komunitas yang berhasil mendorong partisipasi jangka panjang di Meksiko (Rojas Casarrubias et al., 2025). Dengan demikian, riset ini mempertegas bahwa investasi pada penguatan kapasitas PSM tidak hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan BUMDes, tetapi juga pada keberlanjutan program desa.

Penelitian ini secara strategis diposisikan dalam perdebatan akademik mengenai *community empowerment* dan *local governance*, khususnya untuk menutup *gap* literatur terkait peran aktor nonformal (seperti PSM) dalam memperkuat tata kelola keuangan desa. Keberhasilan tata kelola desa sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, yang dapat diperkuat melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan ekosistem *e-partisipasi* (Tong et al., 2025). Guna mengoptimalkan peran PSM dan potensi BUMDes sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, desa perlu mengimplementasikan program pemberdayaan berbasis kelembagaan, mencakup pelatihan pengelolaan administrasi, keuangan, hingga pemasaran digital (Sulaiman et al., 2023). Penting ditekankan bahwa semua program pemberdayaan melalui BUMDes harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencegah penyimpangan (Badaruddin et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan utama untuk menganalisis kontribusi Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mengevaluasi hambatan yang mereka hadapi. Pengelolaan BUMDes yang optimal membutuhkan pelatihan intensif di bidang pelaporan keuangan, manajemen, dan penggunaan teknologi agar staf mampu menyusun laporan yang tepat dan akurat (Aji et al., 2025); kehadiran pendamping seperti PSM terbukti memberikan kontribusi besar pada kualitas laporan keuangan (Ginjar et al., 2020). Namun, upaya ini terkendala oleh kurangnya dana pemerintah, yang mendorong ketergantungan pada program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang sering kali kurang maksimal (Firdaus et al., 2025). Selain itu, efektivitas pemberdayaan menuntut partisipasi aktif pemimpin lokal dan warga agar intervensi sesuai budaya dan berkelanjutan jangka panjang (Aisyah et al., 2023). Penelitian ini menawarkan kontribusi lokal dengan

menyoroti praktik di Kabupaten Sleman. Kebaruan penelitian terletak pada fokusnya terhadap peran PSM sebagai aktor nonformal desa dalam mendukung tata kelola keuangan BUMDes secara lebih akuntabel dan berkelanjutan, sebuah topik yang masih jarang disentuh dalam literatur akademik.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Theory)

Teori pemberdayaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan kekuatan komunitas, sehingga mampu menjawab ketidakjelasan dalam praktik dan penelitian. Teori ini meliputi dimensi psikologis, organisasi, dan komunitas, dengan tujuan untuk memperkuat kekuatan sosial guna mendorong perubahan sistemik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Christens, 2019). Pemberdayaan menjadi konsep utama dalam kebijakan pembangunan, yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat di berbagai bidang, khususnya dalam menghadapi era revolusi industri dan perkembangan setelahnya (Stoeffler, 2018). PSM sebagai fasilitator berfungsi menghubungkan masyarakat dengan sumber daya, pengetahuan, dan jaringan agar mampu mandiri dan berdaya. Dalam konteks penelitian ini, teori pemberdayaan dijadikan dasar untuk merumuskan hipotesis bahwa keterlibatan PSM dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan BUMDes melalui transfer pengetahuan dan pendampingan teknis.

Teori Modal Sosial (Social Capital Theory)

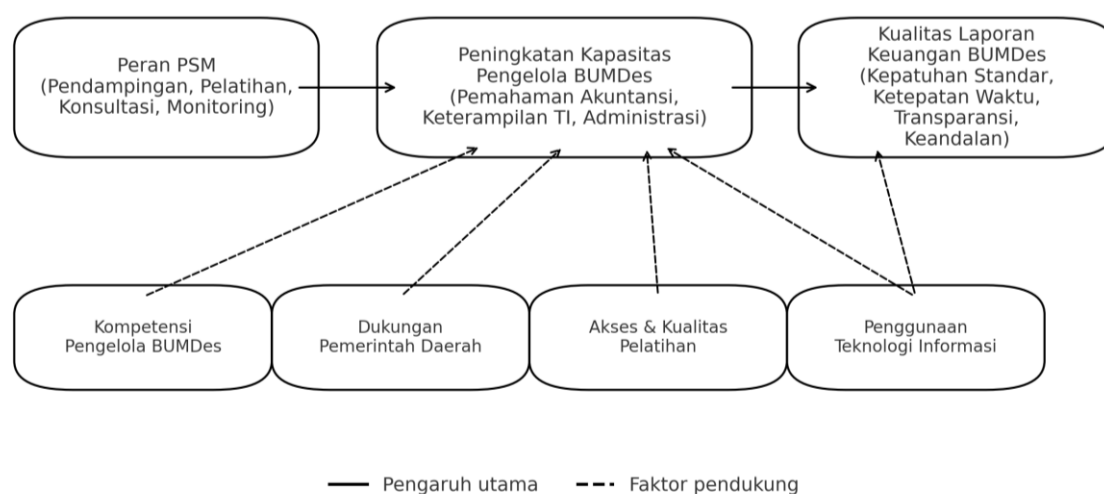
Modal sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sumber daya tak berwujud dari komunitas, nilai-nilai bersama, dan kepercayaan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari (Field, 2004, 2008). Modal sosial memiliki manfaat yang signifikan untuk berbagai hasil ekonomi dan sosiologis, seperti meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas (Lieberman, 2019). PSM berperan sebagai penggerak yang membangun jembatan sosial antara masyarakat dengan lembaga formal seperti pemerintah desa dan BUMDes. Kerangka ini memberi landasan bagi dugaan bahwa semakin kuat modal sosial yang difasilitasi oleh PSM, semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi BUMDes. Dengan kata lain, modal sosial dipandang sebagai variabel mediasi yang menjelaskan mengapa pendampingan PSM dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Teori Pembelajaran Organisasi

Pembelajaran organisasi merupakan proses yang mencakup pengumpulan pengalaman, pengembangan rutinitas, serta transfer pengetahuan dalam suatu entitas. Proses ini melibatkan aktivitas memperoleh, menciptakan, dan menyebarluaskan pengetahuan, disertai dengan penyesuaian rutinitas organisasi dan adaptasi terhadap kondisi sosial dan budaya yang mendukung terciptanya pembelajaran secara berkelanjutan (Rojas-Rodríguez, 2020). PSM juga dapat diposisikan sebagai agen yang membangun kapasitas organisasi melalui pelatihan, transfer pengetahuan, dan penguatan sistem pelaporan. Teori ini menginformasikan hipotesis bahwa keberadaan PSM secara sistematis meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes melalui proses pembelajaran berulang, sehingga kualitas laporan keuangan dapat terjaga konsistensinya.

Operasionalisasi Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, teori pemberdayaan, modal sosial, dan pembelajaran organisasi tidak hanya berfungsi sebagai dasar konseptual, tetapi juga dioperasionalkan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Misalnya, dimensi pemberdayaan masyarakat diukur melalui indikator partisipasi aktif PSM dalam pelatihan dan pendampingan. Modal sosial dioperasionalkan dengan melihat tingkat kepercayaan, jaringan, dan kerjasama antara PSM, pengelola BUMDes, dan pemerintah desa. Sementara itu, teori pembelajaran organisasi diterapkan dalam analisis mengenai sejauh mana praktik pelatihan berulang, transfer pengetahuan, dan rutinitas administrasi keuangan dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, teori-teori ini tidak hanya menjelaskan hubungan antarvariabel, tetapi juga menjadi panduan sistematis dalam menginterpretasi temuan penelitian. Adapun kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka penelitian

Sumber: olahan penulis (2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus (Trainor & Graue, 2013; Whitley, 2008). Pendekatan kualitatif difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial menggunakan data non-numerik, sementara studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap satu atau beberapa kasus dalam situasi kehidupan nyata (de Vries, 2020; Glette & Wiig, 2022; Quintão et al., 2020; Ratnasari & Sudradjat, 2023). Studi kasus ini dipilih karena kemampuannya menangkap dinamika kompleks dengan menggabungkan beragam sumber data (de Vries, 2020; Ratnasari & Sudradjat, 2023). Secara spesifik, pendekatan ini bertujuan memahami secara mendalam peran Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dalam merespons dan menerapkan materi pelaporan keuangan BUMDes dalam konteks nyata di lapangan, serta menangkap persepsi dan makna yang dibangun oleh para PSM.

Lokasi dan obyek penelitian

Penelitian studi kasus ini berlokasi di Kabupaten Sleman karena memiliki jumlah PSM yang signifikan dan aktif dalam program pembangunan. Objek utama penelitian adalah 34 orang Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang dipilih secara purposive dengan kriteria: (1) minimal

dua tahun pengalaman mendampingi pemberdayaan, (2) terlibat aktif dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes, dan (3) bersedia diwawancarai. Pengumpulan data dilakukan selama enam bulan (Juli–Desember 2024) melalui observasi langsung aktivitas pendampingan dan wawancara mendalam semi-terstruktur. Wawancara, yang berlangsung 60–90 menit per responden, dilakukan tatap muka atau daring hingga mencapai titik saturasi data, yaitu ketika tidak ada lagi informasi baru yang diperoleh.

Prosedur analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi yang berlangsung secara simultan (Liza & Wahyuni, 2023; Sjamsir & Ani, 2021). Pada tahap reduksi data, informasi dari observasi dan wawancara terhadap 34 Penggerak Swadaya Masyarakat di Kabupaten Sleman diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan sesuai tujuan penelitian. Proses ini dilakukan melalui thematic coding, yaitu memberi kode pada data relevan, mengelompokkan ke kategori utama (peran PSM, tantangan, strategi pendampingan), dan mengembangkan tema secara iteratif dengan membandingkan data antarresponden. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, dan bagan untuk mengidentifikasi pola serta hubungan yang muncul. Tahap akhir meliputi penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui pengecekan ulang hasil observasi dan wawancara serta triangulasi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking, peer debriefing, dan pencatatan audit trail untuk menjaga transparansi proses penelitian.

HASIL DAN DISKUS

Hasil penelitian diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan 34 Pendamping Sosial Masyarakat (PSM) yang terlibat dalam program pemberdayaan desa. Diskusi difokuskan pada pemahaman PSM terkait tugas pendampingan, bentuk dukungan yang diberikan kepada pengelola BUMDes, serta tantangan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar Kepmendes No. 136/2022. Selain itu, dibahas pula sejauh mana pendampingan berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola keuangan BUMDes, serta faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Temuan tersebut dianalisis dengan merujuk pada teori pemberdayaan masyarakat, modal sosial, dan pembelajaran organisasi sebagai dasar kajian.

Sebagian besar PSM (sekitar 70%) menyatakan mengalami kesulitan pada tahap awal penyusunan laporan keuangan karena keterbatasan pengetahuan teknis, sedangkan 30% lainnya merasa terbantu melalui bimbingan teknis yang pernah diikuti. Variasi pengalaman ini terkonfirmasi melalui kutipan langsung dari responden. Ada PSM yang mengaku awalnya bingung memahami format laporan keuangan BUMDes, namun mulai memahami setelah mengikuti bimbingan teknis dua kali. Sebaliknya, terdapat pula responden yang menilai materi bimbingan teknis terlalu cepat sehingga memerlukan pendampingan lebih intensif.

Temuan lain menunjukkan adanya perbedaan strategi dalam proses pendampingan. Sekitar 40% PSM memilih fokus pada pencatatan transaksi sederhana terlebih dahulu, sementara 60% lainnya langsung mencoba menyusun laporan secara penuh. Hal ini menggambarkan variasi pendekatan dalam menginternalisasi materi pelaporan keuangan.

Meskipun mayoritas responden mengakui manfaat bimbingan teknis, masih ditemukan perbedaan persepsi mengenai kelayakan materi. Sebagian menilai materi sudah cukup komprehensif, sementara sebagian lainnya merasa masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas bimbingan teknis belum sepenuhnya merata di antara peserta. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kewajiban Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Berdasarkan Kepmendes No. 136 Tahun 2022

Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT) Nomor 136 Tahun 2022 pada 2 Desember 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa, BUM Desa Bersama, dan BUM Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa, seluruh BUMDes diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan tersebut. Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan di tingkat desa, yang sebelumnya dihadapkan pada berbagai kendala administratif dan teknis.

Melalui regulasi tersebut, setiap BUMDes wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan pedoman yang mencakup laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (CaLK). Standar pelaporan ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum dan telah disesuaikan dengan karakteristik BUMDes sebagai entitas ekonomi desa. Penerapan ketentuan ini diharapkan dapat mendorong tersedianya sistem pencatatan keuangan yang lebih tertib dan mampu menyajikan informasi keuangan secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi Kepmendes No. 136/2022 membawa konsekuensi bagi pengelola BUMDes, baik terkait kemampuan teknis dalam penyusunan laporan keuangan maupun kebutuhan terhadap pelatihan dan pendampingan. Namun demikian, pedoman ini juga memberikan peluang bagi BUMDes untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha desa serta memperkuat hubungan kerja sama dengan pihak eksternal. Dengan demikian, penerapan keputusan tersebut tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi tata kelola keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan di lingkungan BUMDes.

Keterbatasan Kapasitas Bendahara BUMDes dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pada umumnya, pengelola BUMDes di Kabupaten Sleman, khususnya bendahara, tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau ekonomi sehingga mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan BUMDes, meskipun keberadaan BUMDes telah menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketiadaan dasar pengetahuan akuntansi menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan sering dilakukan secara sederhana, tidak sistematis, dan belum mampu menggambarkan kondisi keuangan secara utuh. Hambatan ini berdampak pada aspek transparansi dan akuntabilitas, serta memengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, kualitas pelaporan yang kurang optimal juga berimplikasi pada terbatasnya akses BUMDes terhadap peluang pendanaan maupun kerja sama dengan pihak eksternal.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan upaya penguatan kapasitas pengelola melalui pelatihan teknis, pendampingan oleh tenaga profesional, serta penyediaan sistem pelaporan keuangan yang mudah diakses dan diterapkan. Upaya ini tidak hanya ditujukan

untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola dan kemandirian BUMDes sebagai entitas usaha desa yang profesional.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola BUMDes, termasuk bendahara, tidak memiliki latar belakang pelatihan formal di bidang akuntansi atau manajemen keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas (Ginancar et al., 2020; Kartikasari et al., 2024). Afrizal et al. (2023) menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dan dukungan pihak eksternal berperan penting dalam memperbaiki pengelolaan keuangan BUMDes. Namun demikian, bantuan yang tersedia sering kali kurang memadai atau belum dimanfaatkan secara optimal. Pelatihan dan program peningkatan kapasitas masih sangat dibutuhkan, meskipun ketersediaannya terbatas dan sulit diakses oleh pengelola BUMDes.

Laporan Keuangan BUMDes yang Belum Mengacu pada Standar

Laporan keuangan merupakan elemen penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena mencerminkan kondisi keuangan, kinerja usaha, serta menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pengelola dan pemangku kepentingan. Namun, dalam praktiknya, banyak laporan keuangan BUMDes belum disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Penyusunan laporan umumnya dilakukan secara sederhana dan manual tanpa format baku yang memadai, sehingga menimbulkan kesulitan dalam membaca, menilai, dan melakukan audit atas informasi keuangan yang disajikan.

Ketidakterstandarisasian laporan keuangan BUMDes dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman akuntansi di kalangan pengelola, keterbatasan pelatihan teknis, dan minimnya pendampingan profesional. Kondisi ini menyebabkan laporan yang dihasilkan tidak lengkap, tidak konsisten, dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dampaknya terlihat pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta berkurangnya kepercayaan masyarakat dan mitra kerja terhadap kinerja BUMDes. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Kartikasari et al. (2024) yang menyatakan bahwa minimnya pemahaman dan keterampilan terkait standar akuntansi mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagian besar pengelola tidak memiliki kompetensi yang memadai di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan, sehingga menyulitkan pencapaian standar dalam pelaporan.

Dengan demikian, upaya penyeragaman laporan keuangan BUMDes menjadi penting untuk dilakukan. Dibutuhkan panduan pelaporan yang sederhana namun sesuai dengan prinsip akuntansi dasar, pelatihan rutin bagi pengelola keuangan desa, serta dukungan sistem digital yang dapat memudahkan proses pencatatan dan pelaporan. Selain itu, peran pendamping sangat penting dalam memberikan arahan terkait pengelolaan keuangan. Pendampingan yang efektif diyakini mampu meningkatkan mutu laporan keuangan melalui dukungan teknis yang diperlukan (Ginancar et al., 2020).

Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes

Di beberapa wilayah, masih terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan secara mandiri karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pemahaman akuntansi dan pencatatan keuangan yang

sistematis. Untuk mengatasi hal tersebut, sebagian BUMDes memilih melibatkan pihak ketiga dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Namun, keterlibatan pihak ketiga tidak selalu menjamin kualitas laporan yang dihasilkan. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai aktivitas operasional dan struktur keuangan BUMDes. Kondisi tersebut menyebabkan data serta informasi dalam laporan keuangan tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Hal ini menjadi persoalan karena laporan keuangan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dan alat pertanggungjawaban publik.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ginanjar et al. (2020), Setiyawati et al. (2023), dan Sudarlan et al. (2024) yang menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga dapat membantu meningkatkan mutu laporan keuangan, tetapi tidak secara otomatis menjamin hasil yang optimal. Kualitas pelaporan tetap ditentukan oleh beberapa faktor, seperti pemahaman terhadap standar akuntansi, pendidikan dan pelatihan pengelola, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta komitmen organisasi.

Ketidaksesuaian dalam laporan keuangan berdampak pada rendahnya tingkat kewajaran dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes. Ketika laporan tidak mencerminkan kondisi operasional secara faktual, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes dapat menurun. Oleh karena itu, penting bagi BUMDes untuk meningkatkan kapasitas internal dalam bidang akuntansi dan memastikan bahwa proses pelaporan dilakukan secara objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbatasan Akses Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengelola BUMDes

Peluang bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperoleh pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan masih sangat terbatas. Kondisi ini terutama dialami oleh bendahara atau staf keuangan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau ekonomi. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengelola BUMDes mengalami kesulitan dalam memahami prinsip dasar akuntansi, menyusun laporan keuangan secara sistematis, serta menerapkan standar pelaporan yang berlaku.

Faktor yang memengaruhi minimnya kesempatan pelatihan antara lain keterbatasan program pendampingan berkelanjutan dari lembaga pembina, rendahnya alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, serta lokasi geografis desa yang jauh dari pusat pelatihan. Selain itu, pelatihan yang tersedia umumnya bersifat jangka pendek, tidak dilaksanakan secara rutin, dan kurang sesuai dengan konteks operasional BUMDes. Akibatnya, pengetahuan yang diperoleh tidak mudah diterapkan secara efektif dalam pengelolaan keuangan sehari-hari.

Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan BUMDes, baik dalam aspek akurasi, transparansi, maupun akuntabilitas. Padahal, laporan keuangan yang baik merupakan indikator penting dalam menilai kinerja BUMDes dan membangun kepercayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari pemerintah daerah, lembaga pendamping, dan institusi pelatihan untuk memperluas akses pelatihan yang berkualitas, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik pengelola BUMDes di lapangan.

Tata Kelola BUMDes yang Belum Optimal sebagai Hambatan Pemenuhan Standar Laporan Keuangan

Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berjalan secara optimal menjadi hambatan utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Lemahnya sistem pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan,

serta tidak adanya pemisahan yang jelas antara fungsi manajerial dan operasional menyebabkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan tidak tertib. Ketidakteraturan ini berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan, baik dari segi akurasi maupun kelengkapan.

Selain itu, minimnya dokumentasi transaksi, ketidakjelasan alur keuangan, dan rendahnya tanggung jawab dalam pelaporan turut memperburuk kondisi tersebut. Ketika tata kelola tidak mengatur secara tegas prosedur administrasi dan keuangan, setiap transaksi berisiko tidak tercatat dengan benar atau bahkan tidak tercatat sama sekali. Akibatnya, laporan keuangan sulit disusun secara sistematis, dan berbagai unsur penting dalam standar pelaporan seperti keterandalan data, relevansi informasi, dan prinsip kewajaran yang tidak dapat terpenuhi.

Situasi ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola BUMDes tidak hanya berdampak pada aspek manajerial, tetapi juga sangat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pengelola BUMDes perlu memahami prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan tata kelola yang kuat, setiap proses keuangan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah, akurat, dan sesuai standar.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa di berbagai daerah di Indonesia terdapat banyak pihak yang berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan desa. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun kelembagaan desa. Peran ini tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, serta tenaga fungsional yang ditempatkan secara khusus di tingkat desa.

Salah satu pihak yang memiliki kontribusi signifikan adalah pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM). Keberadaan PSM di desa ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengelola potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi aktif. Tugas mereka mencakup berbagai aktivitas pembangunan desa, antara lain pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Meskipun tugas PSM luas dan berkaitan dengan keseluruhan aktivitas perdesaan, mereka juga memiliki peran strategis dalam pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PSM menjadi mitra penting dalam memastikan BUMDes berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, termasuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan kebutuhan BUMDes untuk memiliki sistem keuangan yang tertib agar mampu bersaing dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya berupa pengawasan, tetapi juga edukasi dan bimbingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan dukungan tersebut, pengelola BUMDes dapat meningkatkan pemahaman mengenai standar akuntansi dan praktik pelaporan yang benar, mengingat sebagian besar pengelola tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan. Oleh karena itu, sinergi antara PSM dan BUMDes menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang profesional dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori modal sosial. Jejaring antar-PSM dan interaksi dengan fasilitator pelatihan berperan dalam memperkuat pemahaman materi. Modal sosial berupa kepercayaan dan kerja sama antar-PSM mempermudah proses berbagi pengetahuan, sehingga PSM yang memiliki keterbatasan kemampuan dapat belajar dari rekan

sejawatnya. Selain itu, temuan ini selaras dengan teori pembelajaran organisasi. Bimbingan teknis berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran kolektif, di mana PSM tidak hanya menyerap informasi baru, tetapi juga membangun pemahaman bersama melalui praktik dan diskusi lapangan. Pelatihan yang dilakukan secara berulang dapat mempercepat proses pembelajaran kelembagaan pada tingkat komunitas.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya seperti waktu pelatihan yang singkat, resistensi dari sebagian aparat desa, serta faktor sosial budaya berupa perbedaan latar belakang pendidikan PSM. Hambatan tersebut perlu menjadi perhatian apabila program bimbingan teknis akan diperluas ke wilayah lain.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup wilayah Kabupaten Sleman sehingga hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya mewakili kondisi di daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Jumlah partisipan yang terbatas, yaitu 34 PSM, juga membatasi kemampuan generalisasi temuan penelitian ini. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif tidak memungkinkan pengukuran dampak secara kuantitatif, sehingga hasil yang diperoleh bersifat deskriptif dan interpretatif.

Keterbatasan lainnya terletak pada penggunaan data sekunder yang sangat bergantung pada kelengkapan dokumen dan keterbukaan responden. Durasi penelitian yang relatif singkat, yakni enam bulan, juga belum dapat menggambarkan dampak jangka panjang pendampingan PSM terhadap perbaikan kualitas laporan keuangan BUMDes.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya dalam pemenuhan standar yang diatur dalam Kepmendes PDTT No. 136 Tahun 2022. Kehadiran PSM dapat menjembatani keterbatasan kapasitas pengelola BUMDes yang umumnya tidak memiliki latar belakang akuntansi dan manajemen keuangan. Melalui pendampingan, PSM memberikan edukasi, bimbingan teknis, serta mendorong penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Namun demikian, efektivitas peran PSM masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan kompetensi PSM di bidang akuntansi, pelatihan yang bersifat sporadis dan berjangka pendek, lemahnya tata kelola internal BUMDes, serta terbatasnya dukungan dari pemerintah daerah. Keterlibatan pihak ketiga juga tidak selalu menjamin akurasi dan kewajaran laporan keuangan, karena minimnya pemahaman terhadap karakteristik dan operasional BUMDes.

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan BUMDes, diperlukan pendekatan yang holistik. Strategi yang direkomendasikan meliputi: (1) pelatihan teknis yang berkelanjutan bagi PSM dan pengelola BUMDes; (2) penguatan peran PSM dalam sistem tata kelola desa secara formal; (3) pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan keuangan; dan (4) dukungan multipihak, baik finansial maupun nonfinansial, agar proses pendampingan dapat berjalan secara efektif. Dengan penerapan strategi tersebut, pengelolaan BUMDes diharapkan menjadi lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi desa.

Referensi

- Afrizal, A., Nazaki, N., Winarti, N., Darmawan, E., Putra, A., Afnira, E., & Alif Farhan, A. (2024). Innovation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) to Improve the Economy of Village Communities in Bintan Regency. *BIO Web of Conferences*, 134, 03007. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202413403007>
- Ahmad, M. S., & Abu Talib, N. B. (2013). Local Government Systems and Decentralization: Evidence from Pakistan's Devolution Plan. *Contemporary Economics*, 7(1), 33–44. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.72>
- Ahmad, M. S., & Abu Talib, N. B. (2016). Analysis of Community Empowerment on Projects Sustainability: Moderating Role of Sense of Community. *Social Indicators Research*, 129(3), 1039–1056. <https://doi.org/10.1007/s11205-014-0781-9>
- Aisyah, R. H. S., Shubhan, M. H., Minarno, N. B., Siswanto, S., Sudarsono, S., Hendarta, S., Rianda, R. V., Rianda, R. A., Munir, A., & Irianto, H. (2023). The Community Empowerment Policy to Lead A Clean and Healthy Life in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 173–188. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1367.pp173-188>
- Aji, J. S., Mina, F. L. P., & Pahlevi, R. W. (2025). The Effectiveness of the Role of Village-Owned Enterprises (Bumdes) as an Instrument for Improving Community Economic Empowerment. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1475(1), 012019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1475/1/012019>
- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2021). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(3), 163–175. <https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855>
- Christens, B. D. (2019). *Community Power and Empowerment*. Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190605582.001.0001>
- de Vries, K. (2020). Case study methodology. In *Critical Qualitative Health Research* (pp. 41–52). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429432774-2>
- Field, J. (2004). *Social Capital*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203634080>
- Field, J. (2008). *Social Capital*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203930519>
- Firdaus, M. J., Suwaryo, U., Alamsah, N., & Rahmatunnisa, M. (2025). The Urgency of Community Participation and Empowerment in Corporate Social Responsibility (CSR) Programs: A Case Study in Riau Province, Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(8). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5783>
- Fitriani, D., Md Shahbudin, A. S., & Shauki, E. R. (2024). Exploring BUMDES accountability: Balancing expectations and reality. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2402083>
- Ginancar, Y., Hernita, N., Riyadi, W., & Rahmayani, M. W. (2020). Factors Affecting The Quality Financial Statement of Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 466(1), 012009. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/466/1/012009>
- Glette, M., & Wiig, S. (2022). The Headaches of Case Study Research: A Discussion of Emerging Challenges and Possible Ways Out of the Pain. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5246>
- Hanafie, N. E. (2020). Evaluasi Optimalisasi Peran Dan Fungsi Penggerak Swadaya Masyarakat. *Jurnal*

- Administrasi Pendidikan*, 17(1), 35–44. <https://doi.org/10.17509/jap.v27i1.24395>
- Kania, I., Anggadwita, G., & Alamanda, D. T. (2021). A new approach to stimulate rural entrepreneurship through village-owned enterprises in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 15(3), 432–450. <https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137>
- Kartikasari, E. D., Zainuddin, S. A. B., & Jamil, A. B. (2024). *Transformation of Accounting Information Systems in the Management of BUMDesa Financial Performance in the Digitalization Era* (pp. 537–543). https://doi.org/10.1007/978-3-031-53877-3_42
- Kaysin, A., Antoniello, P., Agarwal, S., & Perry, H. (2024). Strategies for Sustained Empowerment of Community Health Workers: A Qualitative Analysis of the Comprehensive Rural Health Project in Jamkhed, India. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 61. <https://doi.org/10.1177/00469580241235059>
- Kurniasih, D. (2025). Social Welfare of Rural Communities as a Function of Social Workers' Empowerment. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 12(5), 124–140. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2350>
- Lieberman, E. S. (2019). Building Community Social Capital. In *Social Pathways to Health Vulnerability* (pp. 207–235). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93326-9_9
- Liza, N., & Wahyuni, S. (2023). Peranan Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam Pemberian Layanan Informasi untuk Mengembangkan Perilaku Jujur Siswa. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 381–394. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i2.460>
- Nalikan, M., . S., . S., & Rozikin, M. (2025). Community Empowerment in Rural Areas Based on Social Capital in Lamongan Regency: A Holistic and Collaborative Approach. *Journal of Ecohumanism*, 4(1). <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6216>
- O'Leary, P. J., Young, A., McAuliffe, D., & Wismayanti, Y. (2019). Developing the social work role in the Indonesian child protection system. *International Social Work*, 62(2), 814–828. <https://doi.org/10.1177/0020872817747028>
- Putra, I. R. A. S., Wibowo, R. A., Purwadi, Andari, T., Asrori, Christy, N. N. A., Santoso, C. W. B., Harefa, H. Y., & Suryawardana, E. (2025). Village-Owned Enterprises Perspectives Towards Challenges and Opportunities in Rural Entrepreneurship: A Qualitative Study with Maxqda Tools. *Administrative Sciences*, 15(3), 74. <https://doi.org/10.3390/admsci15030074>
- Quintão, C., Andrade, P., & Almeida, F. (2020). How to Improve the Validity and Reliability of a Case Study Approach? *Journal of Interdisciplinary Studies in Education*, 9(2), 273–284. <https://doi.org/10.32674/jise.v9i2.2026>
- Rahayu, M. J., Mukaromah, H., & Mulyanto, M. (2024). Social capital-based strategy of sustainable village-owned enterprises (BUMDes) development. *International Journal of Social Economics*, 51(3), 297–312. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2022-0700>
- Ratnasari, A., & Sudradjat, I. (2023). Case study approach in post-occupancy evaluation research. *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur*, 8(3), 427–434. <https://doi.org/10.30822/arteks.v8i3.2584>
- Rojas Casarrubias, C., Aparicio López, J. L., Rodríguez Alviso, C., Castro Bello, M., & Villerías Salinas, S. (2025). Community Environmental Leadership and Sustainability: Building Knowledge from the Local Level. *Sustainability*, 17(8), 3626. <https://doi.org/10.3390/su17083626>
- Sakanga, V. I. R., Chastain, P. S., McGlasson, K. L., Kaiser, J. L., Bwalya, M., Mwansa, M., Mataka, K., Kalaba, D., Scott, N. A., & Vian, T. (2020). Building financial management capacity for

- community ownership of development initiatives in rural Zambia. *The International Journal of Health Planning and Management*, 35(1), 36–51. <https://doi.org/10.1002/hpm.2810>
- Salim, K. (2024). PARTISIPASI RELAWAN SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUDA PEDULI DKI JAKARTA. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 6(1), 31–37. <https://doi.org/10.55745/jwbp.v6i1.166>
- Setiyawati, H., Rahayu, P., & Nugroho, L. (2023). Determinants of Accountability for The Management of Funds Vis-À-Vis Village Governments in Indonesia (Empirical Case in Sukabumi, West Java). *Sosyoekonomi*, 31(56), 191–204. <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.02.09>
- Sjamsir, H., & Ani, Y. (2021). Nature-based Learning Analysis in the Nature School of Early Childhood Education-Barokallah Samarinda. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 13(2), 49–52. <https://doi.org/10.9756/INT-JECSE/V13I2.211038>
- Stoeffler, S. W. (2018). *Community Empowerment* (pp. 265–280). https://doi.org/10.1007/978-3-319-77416-9_16
- Sudarlan, S., Surahman, Affan, N., Maghfirah Vidhiyanty, P., & Hasanah, L. (2024). Enhancing financial reporting quality in village-owned enterprises: The role of organizational competencies. *Public and Municipal Finance*, 13(2), 83–97. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(2\).2024.08](https://doi.org/10.21511/pmf.13(2).2024.08)
- Sulaiman, A. I., Sabiq, A., Rahayu, D. B. S., Prastyanti, S., Sugito, T., Wijayanti, I. K. E., & Weningsih, S. (2023). Economic Institutional Empowerment Model as a Climate and Energy Independent Village Based on Local Wisdom. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 17(6), e03728. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n6-022>
- Sutadi, K. (2024). *Triggering the spirit of neighborhood: To create productive green environment*. 030014. <https://doi.org/10.1063/5.0179835>
- Sutisna, A., Retnowati, E., & Saripah, I. (2024). *Critical pedagogy review: A sustainable training model based on blended learning to improve the competence of tourism village facilitators in Indonesia*. 040011. <https://doi.org/10.1063/5.0210287>
- Tong, L., Ji, H., Zhang, H., Chen, L., & Cheng, X. (2025). Can <scp>information and communication technology</scp> drive effective spatial governance in rural areas? Emergency of e-participation ecosystem from rural China. *Information Systems Journal*, 35(2), 674–709. <https://doi.org/10.1111/isj.12550>
- Trainor, A. A., & Graue, E. (Eds.). (2013). *Reviewing Qualitative Research in the Social Sciences*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203813324>
- Whitley, R. (2008). Social Capital and Public Health. In *Social Capital and Health* (pp. 95–115). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71311-3_6

Ethics declarations

Funding

The author(s) received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

Availability of data and materials

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

Competing interests

No potential competing interest was reported by the authors